



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNANIYAH

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 479810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m²/90 m² di KAB / KOTA

KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

2. Tanah Seluas 480 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR,

HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

3. Tanah Seluas 8.415 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR,

HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

4. Tanah Seluas 7.672 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR,

HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

5. Tanah Seluas 9.100 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR,

HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

6. Tanah Seluas 7.000 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR,

HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.628.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 1.250.000

2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX ERTIGA Tahun 2012, HASIL

SENDIRI Rp. 85.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC 123 Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 5.500.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
25.878.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.853.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.795.641
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.423.277.141
III. HUTANG	Rp.	468.578.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	954.698.341

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.